

**PEREBUTAN BATAS KEKUASAAN DALAM RUMAH  
(THE GENDER RELATION AS A POWER RELATION IN SOCIETY OF SUB  
DISTRICT KERENG BANGKIRAI, CENTER OF BORNEO)**

**Oleh: Evi Nurleni<sup>a</sup>, Merrisa Ocrora<sup>b</sup>**

<sup>a</sup>Pengajar di Jurusan Sosiologi FISIP, Universitas Palangka Raya

<sup>b</sup>Pengajar di Jurusan Sosiologi FISIP, Universitas Palangka Raya

Email: [evinurleni@fisip.upr.ac.id](mailto:evinurleni@fisip.upr.ac.id); [moctora@gmail.com](mailto:moctora@gmail.com)

**ABSTRAK:**

Politik seksual merupakan relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan yang menyebabkan perempuan memiliki status sebagai minoritas. Seksual dianggap sebagai status yang memiliki implikasi politik; dalam bentuk relasi kekuasaan dalam keluarga; dimana perempuan melakukan penyesuaian dan perlawanan budaya patriarki. Kelurahan Kereng Bangkirai berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sebangau (TNS); dimana Danau Kereng Bangkirai sebagai sumber mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan, bersentuhan langsung dengan kebijakan negara dan dunia internasional. Perempuan Kereng Bangkirai berada dalam perjuangan antara kepentingan negara dan kepentingan ekonomi keluarga. Sehingga, terlihat relasi kekuasaan gender dalam perebutan akses dan kontrol perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan sumber daya dalam rumah tangga; berhadapan dengan pembatasan wilayah jelajah di sekitar TNS. Fokus penelitian bagaimana profil peran kerja gender dilihat dari profil aktifitas, akses dan kontrol? Dan bagaimana kondisi relasi kekuasaan (gender) ruang domestik dan publik perempuan Kereng Bangkirai?

Temuan bahwa masyarakat Kereng Bangkirai berada dalam perubahan relasi kuasa terhadap ruang publik. Perempuan merebut ruang kerja produktif, karena penghasilan suami tidak menentu, akibat perubahan status Danau Kereng Bangkirai sebagai wilayah konservasi (Taman Nasional Sebangau). Pada sisi lain, perempuan terus berjuang mendapatkan akses ruang publik untuk berpartisipasi dalam mengontrol keputusan penting dalam politik kemasyarakatan. Namun, tanggung jawab reproduktif mengurangi banyak kemungkinan perempuan di sektor produktif dan komunitas.

**Kata Kunci:** *Politik Seksual, Relasi Kuasa, Peran Gender*

## **I. PENDAHULUAN**

Kata politik dalam pemahaman umum, seringkali hanya dikaitkan dengan realitas kekuasaan “besar”, yaitu hanya pada pengertian kekuasaan pemerintahan atau legislatif saja. Tetapi jika kita melihat makna kata politik itu sendiri, maka sebenarnya kita akan menemukan bahwa politik itu adalah hal yang berkaitan dengan kekuasaan itu. Dan hal kekuasaan itu ketika terdapat pertarungan memperebutkan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya

tertentu. Menurut “Kate Millet mendefinisikan politik sebagai hubungan yang distrukturkan oleh kekuasaan di mana ada satu kelompok dikontrol oleh kelompok yang lainnya.... Bahkan secara lebih jauh, (ia mengatakan) feminisme sosialisme memandang bahwa cara-cara organisasi atau kelembagaan politik merupakan reflika dari pembagian (kekuasaan) jenis kelamin Artinya bahwa politik itu adalah realitas pembagian kuasa, dimana ada kelompok yang dikontrol oleh kelompok yang lain;

dalam masyarakat luas”<sup>1</sup> dalam relasi gender biasanya disebut dengan politik seksual.

Menurut James Scott, kekuasaan adalah relasi antara dua orang yang merupakan atasan dan bawahan atau *paramount agent* dan *subordinate agent*, dimana terdapat struktur dominasi di dalamnya.<sup>2</sup> Dan relasi gender pada dasarnya dilandasi oleh relasi kekuasaan, dalam pola kekuasaan patriakhi, dimana subyeknya adalah laki-laki dan perempuan, yang berakar dalam ranah privat dan publik dalam rumah tangga dan keluarga.<sup>3</sup> Dalam “pertarungan”nya terdapat pihak yang didominasi dan pihak yang disubordinasi. Sehingga, saya menyimpulkan inilah pertarungan politik perempuan yang sesungguhnya, yakni perebutan kekuasaan dalam lingkungan hidupnya, termasuk relasi kekuasaan dalam rumah tangganya maupun dalam relasi dalam ranah publik. Karena sebenarnya, apa yang terjadi di dalam rumah perempuan, itu sekaligus merupakan gambaran kondisi perempuan lingkungan sosialnya atau dalam reflika relasi pembagian kekuasaan jenis kelamin menurut Kate Miller di atas.

Politik seksual merupakan relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan yang menyebabkan perempuan memiliki status sebagai minoritas. Menurut Kate Millet, patriarki berlangsung selama berabad-abad, dan masyarakat kita masih terpilah-pilah dalam praktek-praktek kekerasan dan demonstrasi kekuatan kaum laki-laki atas pihak lain. Laki-laki belajar mendominasi karena sejak kecil mereka diajarkan untuk menjadi dominan. Sehingga, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam relasi

dominan dan didominasi. Sehingga, perempuan dan laki-laki dianggap sebagai bagian dari dua budaya berbeda yang dibangun sejak kecil.<sup>4</sup>

Dalam relasi gender, laki-laki dianggap bertanggung jawab atas seluruh keluarga baik atas kekayaan keluarga dan garis keturunan, sementara perempuan mengurus rumah dan anak-anaknya. Perkawinan adalah kontrak antara perempuan dan laki-laki ketika seorang perempuan menikah, dia harus melakukan pekerjaan rumah tangga dengan imbalan dukungan finansial yang diberikan oleh seorang laki-laki. Dalam patriarki tradisional, perempuan adalah kelompok minoritas, yang tidak memiliki banyak hak, diperlakukan tidak setara, tidak bisa bertanggung jawab atas ekonomi keluarga dan diperlakukan sebagai tanpa status hukum. Dalam patriarki kontemporer, laki-laki mendominasi sebagai pemimpin atau penguasa keluarga dimana perempuan membutuhkan persetujuan laki-laki untuk melakukan sesuatu.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu, dominasi jenis kelamin ini bersifat seksual. Laki-laki mengerahkan kekuatan atau kekuasaan melalui seksualitas dalam keintiman. Dimana laki-laki memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang dia mau, tetapi perempuan tidak memiliki hak untuk keberatan. Inilah yang disebut dengan pertempuran jenis kelamin; seksual dianggap sebagai status yang memiliki implikasi politik; dalam bentuk relasi kekuasaan dalam keluarga; dimana perempuan melakukan penyesuaian dan

<sup>1</sup> Maggie Humm, *Ensiklopedi Feminisme* (Jakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 350.

<sup>2</sup> John Scott, *Sosiologi (The Key Concept)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 202-204.

<sup>3</sup> *Ibid*, 205

<sup>4</sup> Marlène Charrier, *Sexual Politics*, Kate Millet, diunduh dari file:///F:/politic%20seksual1.pdf

<sup>5</sup> *Ibid*

perlawanan budaya patriarki.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, relasi kekuasaan gender seperti ini akan dinilai dalam masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan kondisi masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengetahui bagaimana akses dan kontrol perempuan dan laki-laki nelayan tangkap ikan dalam ranah publik dan privat di Kelurahan Kereng Bangkirai? Dan bagaimana kondisi kekuasaan perempuan dalam privat dan publik dalam masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan analisis gender GFA (Gender Framework Analysis) atau dikenal juga dengan teknik analisis Harvard. Analisis Harvard digunakan untuk mendeskripsikan profil peran gender dari suatu kelompok sosial, dalam tiga komponen profil yakni aktifitas, akses dan kontrol.<sup>7</sup> Teknik ini nantinya akan memberikan gambaran kondisi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan keuangan dan penghasilan keluarga, serta partisipasi perempuan dalam keputusan di lingkup publik yang berkaitan dengan penghasilan dalam keluarga dalam masyarakat nelayan tangkap ikan di Kelurahan Kereng Bangkirai. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik ialah pemetaan sosial, dengan alat yang digunakan kuisioner dan daftar tabel. Juga menggunakan wawancara terbuka, dengan

alat yang digunakan daftar pertanyaan terbuka sambil menggali berbagai pengalaman hidup informan.

Selain melakukan pemilahan dan pemilahan data, maka terdapat empat langkah dalam kerangka analisis gender teknik Harvard atau GFA sebagai berikut:

- a. Melakukan Profil Akses dan Kontrol, melakukan identifikasi akses dan kontrol atas sumberdaya yang dimanfaatkan oleh perempuan dan laki-laki (dengan asumsi pernyataan: siapa mendapatkan apa? Siapa mengendalikan apa? Siapa menerima apa?)
- b. Melakukan profil terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian Peran antara Laki-laki dan Perempuan melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam pola pembagian kerja (profil kegiatan), akses dan kontrol terhadap sumberdaya (profil akses dan kontrol)
- c. Melakukan analisis Siklus Program melakukan identifikasi upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.

## III. HASIL PENELITIAN

### 3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai

Kelurahan Kereng Bangkirai dulunya adalah sebuah desa yang hanya terdiri dari 21 kepala keluarga atau 90 jiwa saja. Kata Kereng Bangkirai sendiri berasal dari Bahasa Dayak Ngaju, yakni Kereng yang berarti "Tanah Dataran Tinggi" dan Bangkirai adalah nama sejenis pepohonan kayu. Sehingga arti Kereng Bangkirai

<sup>6</sup> Kate Millet, *Sexual Politics* (Urbana dan Chicago: University Of Illinois Press) 2000 diunduh dari [https://archive.org/stream/KateMilletSexualPolitics/Kate%20Millet--Sexual%20Politics\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/KateMilletSexualPolitics/Kate%20Millet--Sexual%20Politics_djvu.txt)

<sup>7</sup> Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2002), 15-23.

adalah tanah dataran tinggi yang ditumbuhi pepohonan kayu Bangkirai, yang banyak tumbuh disekitar sungai Sebangau.

Perubahan status desa menjadi kelurahan pada 31 Juli 1989, ditetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor: 414/42/Pend, pada masa itu wilayahnya masih tergabung dengan Kelurahan Sabaru. Namun, bersamaan dengan otonomi daerah maka pada bulan Maret 2001, walikota melakukan pemekaran kelurahan dengan membagi menjadi 2 kelurahan yakni Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kelurahan Sabaru, sampai sekarang.<sup>8</sup>

Secara administrasi, Kelurahan Kereng Bangkirai merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Sebangau Kotamadya Palangka Raya.<sup>9</sup> Kelurahan Kereng Bangkirai berbatasan dengan wilayah pada bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, bagian Utara berbatasan dengan Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Menteng, bagian Timur berbatasan dengan Kelurahan Sabaru dan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan (Sungai Sebangau dan Sungai Bakung).<sup>10</sup>

Luas wilayah keseluruhan kecamatan Sebangau adalah 641,50 km<sup>2</sup>, dan wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai merupakan wilayah terluas di kecamatan tersebut, yakni 323,43 Km<sup>2</sup> atau sekitar 50,42 persen, dengan kepadatan penduduk 22,52 perKm<sup>2</sup>. Wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai terbagi menjadi 3 (tiga) RW

(Rukun Warga) dan 19 RT (Rukun Tetangga), yaitu 5 RT di RW 001, 6 RT di RW 002 dan 7 RT di RW 003. Dan kawasan yang berada membentang di jalur Sungai Sebangau dan berdekatan dengan Dermaga DALLJ adalah wilayah RW 001, yang terdiri dari 5 RT. Oleh sebab itu, lokasi yang dipilih dalam penelitian ini, yakni RW 001 yang terdiri dari 658 Kepala Keluarga, karena karakteristik masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap.<sup>11</sup>

Berdasarkan data statistik tahun 2016, jumlah penduduk di Kelurahan Kereng Bangkirai adalah 13.085 orang. Jika dilihat pembagian penduduk berdasarkan jenis kelamin maka terdapat 6.114 orang penduduk laki-laki dan 6.971 orang penduduk perempuan, dengan rasio 1:14 orang. Sementara itu, jumlah kepala keluarga di Kelurahan Kereng Bangkirai yakni 2.617 KK dengan perkiraan jumlah anggota keluarga 5 orang per keluarga.<sup>12</sup> Sementara dalam lokasi penelitian sendiri jumlah penduduk RW 001 adalah 2.465 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.293 orang dan perempuan sebanyak 1.172 orang.

Penduduk Kelurahan Kereng Bangkirai didominasi oleh warga negara Indonesia, yang beragama Islam, sebanyak 8.580 umat, selanjutnya Kristen 2.522 umat, Katolik 59 umat, Budha 8 umat dan aliran kepercayaan (Kaharingan) 3 umat.<sup>13</sup> Dan umumnya adalah orang Dayak (45 persen) dan Banjar (25 persen), serta Jawa sekitar 20 persen. Berdasarkan data di atas,

<sup>8</sup> Data Monografi Kelurahan Kereng Bangkirai Tahun 2016

<sup>9</sup> Wilayah administrasi kotamadya Palangkaraya sendiri terbagi dalam 5 (lima) kecamatan, yaitu Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit. Kecamatan Sebangau sendiri memiliki 6 (enam) wilayah kelurahan, yaitu

Kereng Bangkirai, Sabaru, Kalamangan, Kameloh Baru, Bereng Bengkel dan Danau Tundai.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Kelurahan Sebangau dalam Angka 2015*, Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

maka penduduk di kawasan penelitian ini ialah orang Dayak yang beragama Islam.

Kawasan pemukiman penduduk asal yakni disekitar pinggiran Sungai Kereng Bangkirai, mereka menempati rumah panggung, milik sendiri dengan kepemilikan tanah sebagian besarnya menggunakan HGT (hak guna tanah), belum memiliki dokumen resmi kepemilikan tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT). Rumah dan tanah yang mereka tempati merupakan warisan turun temurun. Kawasan pemukiman penduduk cukup padat, dan jalan menuju pemukiman dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda 2 dan 4, melalui jembatan kayu yang sambung menyambung antara kawasan dan rumah-rumah penduduk.

Masyarakat bermatapencaharian sebagai nelayan tangkap tradisional atau menggunakan alat tangkap tradisional yang disebut dengan *tampirai* dan jala atau jaring. Walaupun terdapat juga kegiatan pemeliharaan ikan di kolam dan tambak, namun jumlahnya sedikit. Terdapat juga kelompok keluarga yang bermata pencaharian sebagai pedagang, tukang dan kerja serabutan lainnya. Ketika melakukan wawancara awal dengan Ketua RT 02 RW 001, beliau mengakui bahwa umumnya masyarakat mengeluhkan semakin sulitnya kondisi ekonomi masyarakat, karena hasil tangkap ikan semakin berkurang.<sup>14</sup> Hanya saja ketika dikonfirmasi ke lapangan, terjadi perdebatan dan kontraversi mengenai penyebab berkurangnya jumlah ikan hasil tangkap

Seperti disebutkan di atas, Kelurahan Kereng Bangkirai adalah salah satu kelurahan di kota Palangka Raya, yang berdasarkan peta wilayah merupakan kawasannya berdekatan dengan Kawasan

Taman Nasional Sebangau. Bahkan sungai Kereng Bangkirai yang masuk dalam kawasan taman nasional merupakan kawasan yang menjadi sumber mata pencaharian para nelayan. Dari 5 RT di wilayah RW 01, maka kawasan RT 01 dan 02 adalah pemukiman di sekitar dermaga atau kawasan pinggir sungai yang berhadapan langsung dengan pinggiran kawasan hutan konservasi atau TN Sebangau.

Berdasarkan hasil observasi, kawasan RT 01 dan 02 ini, selain terdampak langsung dengan pemeliharaan hutan penyangga Taman Nasional Sebangau, juga terdampak langsung dengan pengembangan pariwisata Sungai Kereng Bangkirai. Pertama, proyek pemeliharaan Taman Nasional, dilaksanakan oleh WWF Indonesia (*World Wide Fund for Nature*), dengan pembuatan bendungan atau dam yang berfungsi sebagai penahan laju air di kawasan TN Sebangau yang seluruhnya ditutupi oleh lahan gambut. Proyek ini didukung oleh dunia pendidikan atau UPT-CIMTROP (*Center for International Co-Operation in Sustainable Management Peatland*) Universitas Palangka Raya yang turut serta menjaga kawasan LAHG (Laboratorium Alam Hutan Lambut). Namun, dalam persepsi masyarakat nelayan, bendungan atau dam ini berdampak pada pasokan jumlah ikan yang terlepas ke sungai atau danau pada musim kering, karena ikan tertahan dan mati di dalam bendungan pada musim kemarau.<sup>15</sup> Dampaknya pada pengurangan jumlah hasil tangkap yang berkurang dari musim ke musim. Sehingga memungkinkan terjadinya penolakan terhadap lanjutan pembangunan bendungan atau dam tersebut.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Igen, Ketua RT 02 RW 01, 3 Mei 2017, di Kantor Kelurahan Kereng Bangkirai.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Jamadi, A Usop, Tokoh Masyarakat, tanggal 3 Mei 2017 di rumah beliau.

Kedua, pengembangan kawasan wisata pinggir sungai atau Dermaga LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Dinas Perhubungan Kota Palangaka Raya), sebagai salah pintu masuk Taman Nasional sebagai taman wisata atau eko-wisata yang terdekat dari kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil observasi, pemerintah kota Palangka Raya melalui Dinas Perhubungan melakukan pengembangan kawasan ini, dengan melakukan perbaikan jalan raya, perbaikan dermaga atau pelabuhan *speedboat*, dan pembangunan warung yang representatif untuk kebutuhan wisatawan yang datang ke kawasan itu.

Program ini memunculkan keresahan penduduk akan terjadi penggusuran perumahan karena tempat tinggal mereka selama bertahun-tahun memang tidak dilengkapi dengan surat resmi atau SHM. Pada satu sisi, mereka mengeluhkan karena itu satu-satunya tanah dan rumah yang mereka miliki, jika diganti-untungkan pun, pasti tidak sebanding dengan kerugian yang mereka derita paska penggusuran. Sementara itu, di sisi lain, secara tradisional mereka hanya mengenal mata pencaharian sebagai nelayan saja. Sebagai nelayan mereka harus tinggal dekat air atau sungai, memindahkan mereka ke daratan sama dengan membunuh mereka secara perlahan.<sup>16</sup> Bahwa air dan perahu adalah hidup mereka, tinggal di tepian sungai dan danau adalah pilihan cara hidup yang sudah mereka kenal dan menghidupi mereka secara turun temurun. Tinggal di tepian sungai adalah pengetahuan lokal

bahwa sungai itu kehidupan, memelihara sungai adalah memelihara hidup.

Berdasarkan hasil FGD dengan beberapa tokoh masyarakat, ditemukan bahwa terjadi peralihan pekerjaan dari nelayan tradisional dan pencari hasil hutan (kulit gemur, kayu ramin, dan lain-lain) menjadi pekerjaan swasta lainnya (~serabutan) kira-kira dalam 10 tahun terakhir. Faktor-faktor yang menjadi pendorong peralihan pekerjaan tersebut, sebagai berikut:

1. Para pencari kayu ramin atau kayu bangunan lainnya berhenti sejak dikeluarkannya pelarangan penebangan oleh pemerintah atau disebut dengan *illegal logging*.<sup>17</sup> Umumnya masyarakat memilih menghindari bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan pemerintah, sehingga pilihan beralih ke sektor swasta dianggap pilihan paling rasional.
2. Para pencari hasil hutan seperti gemur, getah jelutung dan lainnya berhenti sejak tertutupnya kerukan atau jalan mengeluarkan kayu, setelah pembuatan bendungan atau DAM oleh WWF dan TN Sebangau. Selain itu para pengepul hasil hutan ini sudah tidak ada lagi, kalau pun ada harga sangat murah.<sup>18</sup>
3. Para pemburu satwa seperti burung Murai dan Cacak Hijau berhenti sejak dibangunnya TN Sebangau karena terjadi pembatasan aktifitas penduduk di hutan karena dianggap dapat mengganggu ekosistem hutan dan satwa.<sup>19</sup>
4. Sebagian nelayan berhenti dari usaha yang turun temurunnya karena

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Artel Yohanes, Tokoh Masyarakat, 4 Mei 2017 di rumah kediaman beliau.

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Noraiko, tanggal 1 Mei 2017 di dermaga DALLJ Kereng Bangkirai

<sup>18</sup> Wawancara dengan Pahruji, tanggal 30 Mei 2017 di tempat kediaman beliau.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Tati tanggal 2 Mei 2017 di tempat kediaman beliau.

menemukan pekerjaan baru di sektor swasta seperti menjadi tenaga honorer, sopir ataupun PNS.<sup>20</sup>

5. Secara sosial, para laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah harus mencari cara untuk mendapatkan penghasilan untuk keluarga, sehingga bekerja serabutan ~kerja apa saja yang penting halal~ adalah jalan keluar dari ketiadaan sumber penghasilan yang sebelumnya.

Berdasarkan gambaran di atas, maka masyarakat di kawasan ini merupakan masyarakat yang rentan mengalami marginalisasi dan tekanan struktural akibat kepentingan pengembangan kawasan. Kaum laki-laki atau suami menerima dampak langsung perubahan dan pembangunan kawasan yakni terkait dengan pekerjaan utama mereka sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Sementara kaum perempuan menerima dampak tidak langsung, yakni mengalami tidak hanya kemiskinan struktural dari suaminya, dan mengalami kemiskinan kultural karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan karena mereka perempuan.

### 3.2. Kondisi Umum Perempuan Kelurahan Kereng Bangkirai

Pemetaan kondisi sosial atau gender masyarakat dilakukan terhadap 226 keluarga dari 658 KK yang ada di kawasan RT 01 sampai 05 di RW 001, dengan teknik pemetaan secara random. Responden semua adalah perempuan dengan cara, yakni pertama, memilih keluarga berdasarkan tempat tinggal yang berdekatan. Kedua, memilih responden yang pekerjaannya terkait langsung dengan sumber daya alam, terutama sungai dan hutan di kawasan itu.

Ketiga, memilih responden yang memiliki wawasan yang cukup terhadap proses, kegiatan dan pelaksanaan pembangunan kawasan. Keempat, sebagai tambahan~ditemukannya pihak-pihak yang memiliki sikap resistensi terselubung terhadap pengembangan kawasan, karena usaha nelayan tangkap mereka terganggu. Walaupun secara umum bersifat pasrah dan memahami kepentingan pemerintah terhadap kawasan tersebut.

Jumlah responden berdasarkan kategori alamat Rukun Tetangga (RT), yaitu di RT 01 berjumlah 76 orang atau 33,6 persen, di RT 02 berjumlah 56 orang atau 24,8 persen, di RT 03 berjumlah 21 orang atau 9,3 persen, di RT 04 berjumlah 46 orang atau 20,4 persen dan RT 05 berjumlah 27 orang atau 11,9 persen. Sementara, jumlah responden berdasarkan usia yaitu 60 orang berusia 17-30 tahun atau 26,5 persen, 106 orang berusia 31-45 tahun atau 46,9 persen, 29 orang berusia 46-55 tahun atau 12,8 persen, 24 orang berusia 56-65 tahun atau 10,6 persen dan 7 orang yang berusia 66-89 tahun atau 3,1 persen. Berdasarkan data di atas jumlah perempuan pada usia produktif yakni antara 31-45 tahun adalah paling tinggi, sementara usia 66-85 tahun dengan jumlah terendah.

Berdasarkan tingkat pendidikan, responden umumnya lulus SD sebanyak 87 orang atau 38,5 persen, kemudian lulus SMP sebanyak 59 orang atau 26,1 persen, selanjutnya lulus SMA 57 orang atau 25,2 persen. Sisanya adalah tidak lulus SD sebanyak 16 orang atau 7,1 persen dan lulus S1 sebanyak 7 orang atau 3,1 persen. Berdasarkan data di atas, maka jumlah perempuan yang lulus SD paling banyak atau 38,5 persen. Peneliti melihat, kondisi ini terkait dengan kemampuan perempuan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Riska, tanggal 2 Mei 2017 di tempat kediaman beliau.

mengakses pekerjaan di sektor formal lebih sulit, dibandingkan di sektor informal. Sehingga, umumnya pendidikan formal tidak terlalu dipentingkan karena dianggap tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan yang umumnya di sektor swasta.

Berdasarkan jenis pekerjaan, responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga berjumlah 177 orang atau 78,3 persen, sementara yang swasta atau pedagang 32 orang atau 14,2 persen. Sedangkan jenis pekerjaan “*serabutan*” berjumlah 11 orang atau sebanyak 4,4 persen. Sedangkan nelayan berjumlah 4 orang atau 1,8 persen dan PNS berjumlah 2 orang atau 0,9 persen. Berdasarkan data di atas, maka perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga (IRT) memiliki prosentase terbesar yakni 78,3 persen. Walaupun berdasarkan hasil observasi, tidak semua perempuan yang disebut IRT ini tidak berpenghasilan. Karena pada kenyataannya, banyak para ibu ini yang berjualan baik secara tetap maupun untuk mengisi waktu luangnya, dengan jumlah 50 persen.

Berdasarkan data jenis pekerjaan suami, maka laki-laki bekerja di sektor usaha yang sangat bervariasi; yakni bekerja sebagai wirausaha berjumlah 48 orang atau 21,1 persen, kerja serabutan berjumlah 28 orang atau 12,3 persen, sebagai nelayan berjumlah 27 orang atau 11,9 persen, pegawai negeri dan swasta 22 orang atau 9,7 persen, sebagai buruh harian lepas dan *batukang* (mengerjakan bangunan) masing-masing berjumlah 21 orang atau 9,3 persen dan bekerja di sektor perdagangan berjumlah 11 orang atau 4,8 persen. Dari data di atas pekerjaan wirausaha, seperti pengusaha batako, sengon, dan lainnya menjadi pekerjaan yang banyak ditekuni

kepala keluarga di Kelurahan Kereng Bangkirai. Walaupun berdasarkan hasil observasi, para laki-laki yang bekerja wirausaha dan serabutan ini, tidak sepenuhnya meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan. Mereka beralih pekerjaan jika hasil tangkapan ikan tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga, seperti menjadi sopir, pedagang, jasa getek ataupun tukang bangunan.<sup>21</sup>

Berdasarkan data lapangan, bahwa laki-laki dan perempuan di Kelurahan Kereng Bangkirai tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, karena umumnya masyarakat menghasilkan uang dari pekerjaan sektor swasta dengan penghasilan yang kurang menentu, seperti wirausaha, buruh harian, berdagang ataupun nelayan tangkap yang sangat bergantung dengan musim. Melalui FGD ditemukan bahwa kondisi masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai yang “miskin” sering menjadi sasaran program pemerintah dan swasta. Sehingga masyarakat umumnya menerima bantuan-bantuan baik uang tunai, modal usaha atau dana program pemberdayaan yang berasal dari dinas kota, propinsi ataupun program nasional, seperti KIP, BKH dan ASKES gratis.

Menurut peneliti, bantuan atau program pemerintah dan LSM justru membentuk ketidakmandirian masyarakat dan mencipta ketergantungan masyarakat yang tinggi pada pemerintah. Pertama, program pemberdayaan atau bantuan bibit ternak atau ikan tambak tidak ada yang berjalan sesuai program yang diharapkan. Kedua, kursus dan pelatihan ketrampilan kerja tidak berkesinambungan dan berkelanjutan. Ketiga, masyarakat kurang mengutamakan pendidikan tinggi, karena anak-anak disiapkan pendidikan dasar

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Pahruji, Rahmad, Naraiko, Abdul Hadi dan Ibu Raudah, tanggal 6 dan 7 Mei 2017

sebagai modal memasuki dunia kerja; karena dunia kerja yang tersedia tidak mengharuskan sekolah tinggi, maka pendidikan cukup sampai pendidikan dasar saja. Keempat, dalam FGD ditemukan ketika diminta merancang program kaum perempuan membuat program yang sudah biasa mereka terima, berupa hibah modal usaha dan pelatihan menjahit, menyulam, peternakan dan sebagainya; kurang kreatifitas.

### 3.3. Gambaran Profil Sosio-Politik Perempuan

#### 3.3.1. Profil Aktifitas dan Akses: Pendapatan dan Ruang Publik

Secara tradisional, masyarakat Dayak Ngaju menganggap bahwa kegiatan menghasilkan uang atau mencari nafkah bisa dilakukan baik perempuan (isteri) atau laki-laki (suami) secara setara. Pada keluarga di Kelurahan Kereng Bangkirai ditemukan bahwa ada aktifitas mencari ikan dan berdagang yang dilakukan bersama-sama oleh isteri dan suami. Namun, ketika dilakukan pendekatan mendalam, sesungguhnya ditemukan perbedaan pemahaman tentang aktifitas menghasilkan uang antara perempuan dan laki-laki. Bahwa konstruksi gender dalam masyarakat menyebabkan pembagian aktifitas dan jenis pekerjaan yang dianggap layak dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Secara sosial budaya, beban aktifitas menghasilkan uang antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan, bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga dibebani tanggung jawab lebih besar dalam hal mencari nafkah, sementara para perempuan dianggap sebagai pencari nafkah tambahan.

Untuk memahami kondisi sosial-ekonomi perempuan di Kelurahan Kereng Bangkirai akan digambarkan di bawah ini. Pertama, rata-rata pengeluaran atau belanja

keluarga untuk kebutuhan primer atau kebutuhan pangan keluarga ialah Rp.1,100.000,- sampai Rp. 2.000.000 perbulan, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 1.1. Rata-Rata Belanja Pebulan Keluarga untuk Kebutuhan Pangan di Kelurahan Kereng Bangkirai*

Kategori	Jlh	Persen
Rp.300.000-Rp.1.000.000	65	28.6
Rp.1.100.000- Rp.2.000.000	105	46.3
Rp.2.100.000- Rp.3.000.000	40	17.6
Rp.3.100.000- Rp.4.000.000	7	3.1
Rp.4.100.000- Rp.5.000.000	3	1.3
Tidak Tahu	7	3.1
<b>Total</b>	<b>227</b>	<b>100</b>

Berdasarkan data di atas, maka status kemampuan ekonomi keluarga di Kelurahan Kereng Bangkirai dapat dikategorikan menjadi 3 tipe, yakni kelas bawah dengan pengeluaran di bawah 1 juta, tipe kelas menengah dengan pengeluaran antara 1 juta sampai 2 juta; kelas atas dengan pengeluaran di atas 2 juta. Sehingga, sebagian besar keluarga di Kereng Bangkirai ini atau 46,3 persen adalah tipe keluarga kelas menengah dengan belanja perbulan rata-rata 1 juta – 2 juta.

Kedua, berkaitan dengan penghasilan atau pendapatan suami, walaupun penghasilan suami kurang pasti tetapi para isteri dapat menyebutkan jumlah rata-rata penghasilan suami perbulan, yakni sebanyak 121 orang atau 53,3 persen, sementara 99 orang atau 43,6 persen tidak dapat, dan sisanya 7 orang atau 3,1 tidak tahu. Jumlah penghasilan suami dipaparkan secara rinci sebagai berikut:

*Tabel 1.2. Rata-rata Penghasilan Suami Perbulan di Kelurahan Kereng Bangkirai*

Kategori	Jlh	Persen
Rp.500.000- Rp.1.000.000	113	49.8
Rp.1.100.000- Rp.2.000.000	44	19.4
Rp.2.100.000- Rp.3.000.000	35	15.4
Rp.3.100.000- Rp.4.000.000	8	3.5
Rp.6.000.000- Rp.7.000.000	5	2.2
Rp.5.100.000- Rp.6.000.000	3	1.3

Rp.4.100.000- Rp.5.000.000	1	0.4
Tidak Tahu	18	7.9
<b>Total</b>	<b>227</b>	<b>100</b>

Berdasarkan data di atas, umumnya penghasilan suami adalah Rp.500.000 - Rp.1.000.000 sebanyak 49,8 persen. Jika jumlah penghasilan suami dibandingkan dengan belanja keluarga, maka penghasilan suami hanya mampu memenuhi sebagian saja dari kebutuhan pangan keluarga. Dalam kondisi yang demikian, maka perempuan “terpaksa” memikirkan dan mencari usaha-usaha lain untuk menambah penghasilan keluarga.

Ketiga, berdasarkan data lapangan bahwa secara umum perempuan atau ibu rumah tangga ini tidak memiliki penghasilan tetap sebanyak 131 orang atau 58,0 persen dan terdapat 96 orang atau 42,3 persen perempuan yang memiliki pendapatan, dengan kategori pendapatan sebagai berikut:

Tabel 1.3. Rata-Rata Pendapatan Ibu Rumah TanggaKelurahan Kereng Bangkirai

Kategori	Jumlah	Persen
Tidak Ada	131	58.0
1.100.000-2.000.000	40	17.7
2.100.000-3.000.000	33	14.6
3.100.000-4.000.000	12	5.3
500.000-1.000.000	8	3.5
4.100.000-5.000.000	2	0.9
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>100</b>

Pendapatan para Ibu Rumah Tangga ini berasal dari kegiatan berjualan atau berdagang, yaitu *bawarung* (menjual makanan jadi), *badagang* (menjual sembako, dll), jual keliling (ikan, sayur, baju) dan nelayan. Jenis pekerjaan produktif para Ibu Rumah Tangga tersebut akan dipaparkan dalam data sebagai berikut:

Tabel 1.4. Kondisi Akses Perempuan terhadap Jenis Pekerjaan Produktif di Kelurahan Kereng Bangkirai

Kategori	Jlh	Persen
1. Tidak Ada	131	58.0
2. Sektor Perdagangan	82	36.3
3. Sektor Swasta Lainnya	6	2.7
4. Nelayan	7	3.1
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>100</b>

Walaupun terdapat 58,0 persen para perempuan masih sangat bergantung pada penghasilan suami, namun terdapat sekitar 42,0 persen yang berinisiatif mengisi waktu luang untuk menambah penghasilan keluarga sambil mengurus anak atau rumah. Aktifitas produktif berupa bedagang seperti berjualan kue, makanan ringan dan es, berjualan sembako, berjualan ikan dan sayur (keliling) dan berjualan baju (kredit dan online) dan pulsa (sebanyak 36,3 persen); sektor swasta lainnya seperti berkebun atau berladang, beternak, pegawai atau buruh dan usaha kreatif seperti sulaman dan jasa (parkir dan getek pariwisata) (sebanyak 2,7 persen) dan nelayan tangkap (sebanyak 3,1 persen). Dalam hal ini, sesungguhnya perempuan melakukan “perebutan kekuasaan” atas ruang-ruang produktif.

Berdasarkan data-data di atas, maka para perempuan atau ibu rumah tangga adalah kelompok masyarakat yang sedang berjuang melawan konstruksi gender tradisional dalam masyarakat; bahwa perempuan tidak harus memiliki penghasilan sendiri, karena tugas perempuan adalah mengurus rumah atau memasak di dapur. Akibatnya, secara ekonomi perempuan menjadi tidak mandiri atau sangat bergantung pada pekerjaan dan penghasilan suami. Meskipun terdapat penghasilan perempuan yang memiliki kontribusi untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga, namun dalam konstruksi

gender dianggap sebagai “tanggung jawab moral” anggota keluarga, sehingga kurang dihargai.

Dalam FGD ditemukan bahwa faktor pendorong keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah sebagai berikut:

1. Para pedagang, terlibat dalam mencari nafkah saat suami kehilangan pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga isteri merasa berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi karena minimnya skill dan tingkat pendidikan rendah, maka menjadi pedagang sembako dan makanan di depan rumah atau di sekolah anak, maupun pedagang keliling adalah pilihan yang paling rasional.<sup>22</sup>
2. Para nelayan, meneruskan pekerjaan suami dan mengambil alih tanggung jawab mencari nafkah, karena suami sakit, lanjut usia atau meninggal. Hal ini disebabkan juga, sebelumnya mereka terlibat bersama suami dalam usaha mencari ikan, sehingga menjadi nelayan adalah pekerjaan yang sudah biasa dilakukan.<sup>23</sup>
3. Para pekerja sektor lainnya seperti honorer dan karyawan, karena terdapat kesempatan atau peluang kerja sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki.

Berdasarkan data di atas, kesadaran kaum perempuan terhadap perubahan tanggung jawab mencari nafkah didorong oleh kondisi alamiah (*nature*) keluarga. Pengambilalihan tanggung jawab bekerja atau mencari nafkah tidak dirasakan memiliki kaitan dengan dampak langsung dari pembangunan dan pengembangan kawasan terhadap aktifitas produksinya, tetapi lebih banyak dikaitkan dengan kebutuhan keluarga. Walaupun terdapat 1,4

persen perempuan yang merasakan dampak perubahan kawasan dalam bentuk pembatasan dan pelarangan aktifitas di sungai dan hutan Kereng Bangkirai.

Selanjutnya, untuk memahami sosio-politik perempuan di Kelurahan Kereng Bangkirai bahwa akses perempuan terhadap ruang publik masih rendah. Pertama, aktifitas perempuan dalam kegiatan pelatihan; yakni sebanyak 190 orang atau 84,1 persen yang tidak pernah terlibat pelatihan dan hanya 33 orang atau 14,6 persen yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan, sementara itu sebanyak 3 orang atau 1,3 persen yang tidak tahu. Dengan jenis pelatihan yang pernah diikuti sebagai berikut:

Tabel 1.4. Keikutsertaan Perempuan dalam Kegiatan Pelatihan di Kelurahan Kereng Bangkirai

Kategori	Jumlah	Persen
Tidak Pernah	190	84.1
Menjahit	9	4.0
Membuat Kue	4	1.8
Bercocok tanam	4	1.8
Lainnya	4	1.8
Masak, Jahit	3	1.3
Memasak	3	1.3
Penataran	2	0.9
Perabotan	2	0.9
Menyulam	1	0.4
Membuat kerupuk	1	0.4
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>100</b>

Berdasarkan data di atas, jenis pelatihan yang diikuti atau diprogramkan kepada perempuan, masih dipahami terkait dengan penguatan peran domestik perempuan, seperti menjahit, membuat kue dan bercocok tanam apotik hidup, memasak, dan lain-lain. Hal ini masih terkait dengan pemahaman yang bias gender dalam kelompok penyelenggara program dan penyelenggara pemerintah; sehingga program pelatihan dan pengembangan

<sup>22</sup> Wawancara dengan Raudah, tanggal 15 Mei 2017 di rumah kediaman beliau.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Siti dan Siti Mariana, tanggal 15 Mei 2017 di rumah kediaman Siti (Indu Mariana).

kemampuan bagi perempuan masih terkait dengan kegiatan memperkuat peran domestik yang umumnya dilakukan oleh perempuan sehari-hari. Atau oleh Kate Millet disebut sebagai reflika dari pembagian (kekuasaan) jenis kelamin dalam masyarakat luas, bahwa perempuan masih dipahami sebagai “penguasa” pada sektor domestik.

Kedua, aktifitas atau partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial, rapat dan sosialisasi program yang diselenggarakan oleh pihak Kelurahan atau RT masih sangat rendah, dengan data sebagai berikut:

*Tabel 1.5. Partisipasi Perempuan dalam kegiatan Kelurahan atau RT di Kelurahan Kereng Bangkirai*

Kategori	Jumlah	Persen
Tidak Pernah	159	70.4
Gotong Royong	41	18.1
Senam, Arisan	10	4.3
Rapat	8	3.5
Pelatihan/Penyuluhan	8	3.5
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan data di atas, maka sebanyak 70,4 persen perempuan tidak pernah terlibat kegiatan sosial, rapat dan sosialisasi program di kelurahan Kereng Bangkirai. Jika pun terdapat kehadiran sebanyak 3,5 persen perempuan dalam rapat atau pelatihan; kehadiran kaum perempuan dalam rapat ini biasanya bersifat insidental saja, misalnya untuk memenuhi jumlah peserta atau karena diwajibkan<sup>24</sup>. Selain itu, melalui pendalaman lewat FGD, yang dimaksud mengikuti rapat di tingkat RT maupun Kelurahan di sini adalah kegiatan yang berkaitan pemilihan ketua

RT dan Lurah. Sehingga partisipasi perempuan dalam hal ini, adalah partisipasi politik semu karena hanya dikaitkan atau dilibatkan untuk menambah jumlah suara pada pemilihan ketua RT atau Lurah saja.

Minimnya partisipasi perempuan dalam mengikuti pelatihan berkaitan dengan ketidaktersediaan waktu luang yang dimiliki sebagai ibu rumah tangga; waktu luang para ibu rumah tangga lebih banyak digunakan untuk mencari nafkah tambahan bagi keluarga dan mengurus rumah tangga. Selain itu, umumnya informasi pelatihan atau kursus gratis yang diselenggarakan tidak diketahui oleh mereka. Secara budaya, kaum perempuan memandang bahwa kaum laki-laki lebih biasa menghadiri rapat dibandingkan kaum perempuan.<sup>25</sup> Tetapi bukan berarti pengetahuan tentang pembangunan dan pengembangan kawasan tidak diketahui oleh kaum perempuan; mereka memperoleh informasi dari suami atau ayah mereka yang mengikuti rapat dengan pemerintah, LSM ataupun pihak lainnya.<sup>26</sup>

Ketiga, aktifitas atau partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan di kelurahan Kereng Bangkirai masih sangat rendah, dengan data sebagai berikut:

*Tabel 1.6. Partisipasi Perempuan dalam kegiatan keagamaan di Kelurahan Kereng Bangkirai*

Kategori	Jumlah	Persen
Tidak Aktif	118	52.2
Aktif:		
Yasinan	100	44.2
Kebaktian	7	3.1
Bakti	1	0.4
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>100</b>

laki umumnya masih bersifat berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Dalam hal ini, perempuan menjadi pihak yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, baik dalam rapat di tingkat RT maupun kelurahan.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Tati, tanggal 8 Mei 2017, dilakukan di rumah kediaman beliau.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Siti, tanggal 9 Mei 2017 di rumah kediaman beliau.

<sup>26</sup> Bahkan informasi tentang pengembangan kawasan lebih mudah digali dari kaum perempuan karena mereka lebih terbuka. Sementara kaum laki-

Bahwa sebanyak 52,2 persen perempuan tidak aktif dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di lembaga keagamaan masing-masing. Berdasarkan FGD, faktor penghambat utama keterlibatan kaum perempuan (IRT) dalam kegiatan sosial keagamaan adalah aktifitas domestik atau reproduktif yang menyita sangat waktu dan energi. Sehingga untuk menambah dengan aktifitas baru banyak para ibu yang mengaku sudah kelelahan. Hal ini diperlihatkan dalam data kegiatan untuk mengisi waktu luang para perempuan atau ibu rumah tangga di kelurahan Kereng Bangkirai di bawah ini:

*Tabel 1.7. Aktifitas Perempuan dalam mengisi waktu luang di Kelurahan Kereng Bangkirai*

Kategori	Jumlah	Persen
Tidak Punya	73	32.3
Mencari Nafkah	40	17.7
Istirahat, Rekreasi	37	16.4
Mengasuh Anak	33	14.6
Silatuhrahmi	29	12.8
Membersihkan Rumah	14	6.2
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>100</b>

Berdasarkan data di atas, bahwa aktifitas perempuan didominasi untuk kegiatan domestik atau kerumahtanggaan, jika pun terdapat aktifitas lainnya sebanyak 17,7 persen untuk mencari nafkah tambahan keluarga. Sehingga dalam hal ini, perempuan mengalami marginalisasi dalam aktifitas publik, sehingga kekuasaan pengambilan keputusan dalam komunitas berada pada tangan kaum laki-laki.

### 3.3.2. Dimensi Kontrol: Pengelolaan Keuangan/Investasi dan Keputusan Publik.

Pada dasarnya, dalam masyarakat Dayak memahami bahwa wilayah domestik dan publik sebagai wilayah yang berada dalam penguasaan baik perempuan dan laki-laki. Terlebih dalam masyarakat petani

atau nelayan, suami dan isteri memutuskan pergi ke tempat kerja bersama-sama, sekaligus juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga bersama-sama. Namun, akan berbeda ketika suami isteri bekerja pada sektor yang berbeda, maka akan terdapat pembagian peran dan kontrol terhadap rumah tangga.

Untuk memahami kondisi “kekuasaan” dalam bidang ekonomi rumah tangga akan dipaparkan berikut. Pertama, pengelola keuangan rumah tangga biasanya adalah perempuan atau sebanyak 63,9 persen. Aktifitas pengelolaan keuangan ini meliputi aktifitas mengatur dan membelanjakan untuk keperluan sehari-hari, seperti makanan pokok, uang jajan anak dan keperluan insidental lainnya. Dalam FGD ditemukan, jika dalam kondisi kehabisan uang belanja, maka perempuan akan melakukan aktifitas mencari ikan (memancing) dan memetik sayuran di pesisiran sungai Kereng atau pinggir sungai atau menanam sayuran di sekitar rumah. Gambaran tentang pengelolaan keuangan akan digambarkan dalam data sebagai berikut:

*Tabel 1.6. Aktifitas Pengelola Keuangan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Kereng Bangkirai*

Kategori	Jumlah	Persen
Perempuan	145	63.9
Bersama-sama	65	28.6
Laki-laki	7	3.1
Tidak Tahu	9	4.4
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>100</b>

Selain itu berdasarkan data di atas, terdapat aktifitas mengelola keuangan bersama-sama oleh suami dan isteri sebanyak 28,6 persen, dalam hal ini suami isteri melakukan pembagian tanggung jawab membelanjakan makanan, ketika keduanya tidak memiliki penghasilan tetap. Artinya bahwa suami dapat membelanjakan uang

hasil kerja untuk kebutuhan pokok yang harus segera dipenuhi saat itu juga, seperti makan dan minum. Artinya, pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan atau kebutuhan rumah tangga tidak mutlak dilakukan oleh perempuan, tetapi dapat dilakukan bersama-sama dalam kondisi tertentu.

Kedua, kepemilikan atas tanah atau rumah yang dipahami sebagai investasi atau tabungan keluarga berada dalam kontrol laki-laki atau sebanyak 56,6 persen. Hal ini diperlihatkan dalam bukti atau surat kepemilikan tanah atau bangunan yang dimiliki oleh keluarga tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

*Tabel 1.7. Surat Kepemilikan Tanah dan Rumah Keluarga di Kelurahan Kereng Bangkirai*

Kategori	Jumlah	Persen
a.n Laki-Laki	132	58.4
a.n Perempuan	50	22.1
Milik Bersama	38	16.8
Tidak Tahu	6	2.7
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>100</b>

Berdasarkan data di atas, kontrol laki-laki atas tanah dan rumah lebih besar dibandingkan pada perempuan. Dalam FGD ditemukan bahwa, walaupun terdapat kepemilikan tanah atas nama perempuan, namun dalam pengaturannya tetap harus mendapat persetujuan suami terlebih dahulu, seperti ingin mendirikan bangunan atau menjual. Dalam hal ini, pertimbangan isteri bukan menjadi penentu akhir dalam pengelolaannya, karena suami yang memiliki kontrol lebih tinggi dalam mempertahankan atau melepaskan kepemilikan baik tanah dan rumah. Sehingga perempuan memiliki kontrol yang lebih rendah terhadap sumber daya berupa tanah dan rumah. Sehingga jika terjadi perceraian, maka perempuan beserta anak akan kehilangan hak mereka atas rumah dan tanah mereka atau mengalami marginalisasi ekonomi dan budaya, karena

kontrol kekuasaan yang tidak seimbang. Selain itu, mengenai terdapat kepemilikan yang dianggap milik bersama, berupa tanah waris dari orang tua; bahwa tanah warisan keluarga yang semula dianggap milik bersama, akhirnya akan berada pada kontrol kaum laki-laki juga.

Selanjutnya, untuk memahamai “penguasaan” atas sumber daya alam, yakni lingkungan perairan atau nelayan. Penguasaan atau kontrol yang dimaksud ialah warisan kepemilikan tradisional atas sungai yang bersifat komunal. Bahwa terdapat individu atau segelintir orang yang dipercaya untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan atas sungai dengan bukti kepemilikan dalam hukum adat setempat. Walaupun pada dasarnya semua orang diperkenankan untuk memanfaatkan ikan di sungai tersebut, yang akan dipaparkan sebagai berikut.

Pertama, pengelolaan sungai dan perikanan lebih besar berada dalam kontrol atau kekuasaan kaum laki-laki, dengan data sebagai berikut:

*Tabel 1.8. Pengelolaan Sungai dan Perikanan di Kelurahan Kereng Bangkirai*

Kategori	Jumlah	Persen
Laki-laki	176	77.9
Perempuan	8	3.5
Keduanya	38	16.8
Tidak Tahu	4	1.8
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>100</b>

Berdasarkan data di atas, bahwa laki-laki memiliki kontrol atau penguasaan terhadap sungai atau sebanyak 77,9 persen. Maksud dari penguasaan di sini adalah kondisi dimana masyarakat memiliki akses untuk melakukan aktifitas produksi di sekitar sungai, baik terkait hewan dan tumbuhan. Data ini menggambarkan padangan tradisional bahwa perempuan tidak memiliki penguasaan atas sungai, maka perempuan dalam posisi yang imperior.

Jika terdapat 16,8 persen perempuan terlibat dalam sektor perikanan atau nelayan sebagai untuk membantu suami atau dalam kondisi suami sudah meninggal atau sakit.

Kedua, terdapat pembagian atau perbedaan aktifitas dan ruang antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan menangkap ikan pada satu daerah aliran sungai tertentu, yang berkaitan dengan konstruksi gender dalam masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai. Kondisi perbedaan aktifitas dan ruang gender tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Perbedaan tempat menangkap ikan. Nelayan laki-laki biasanya memilih menangkap ikan pada perairan dalam di satu daerah aliran sungai tertentu, sedangkan nelayan perempuan menangkap ikan di tepian sungai dangkal yang tidak terlalu jauh dari pemukiman.
- b. Perbedaan lama waktu yang digunakan saat menangkap ikan. Kaum laki-laki menggunakan waktu lebih panjang di tempat usaha dibandingkan dengan kaum perempuan. Nelayan perempuan lebih memilih bekerja *part time* atau paroh waktu, umumnya pada pagi sampai siang, kemudian sore. Nelayan laki-laki memilih bekerja *full day* atau sehari penuh, bahkan ada yang harus tinggal beberapa hari di lokasi tangkap ikan, misalnya dukuh di sungai Bakung, Sungai Alus dan Sungai Bangah.
- c. Perbedaan jenis alat tangkap. Alat tangkap umumnya disebut dengan *tampirai*, nelayan laki-laki menggunakan *tampirai besar*, sementara nelayan perempuan menggunakan *tampirai kecil*.
- d. Perbedaan jenis ikan hasil tangkapan. Jenis ikan yang ditangkap oleh kaum laki-laki adalah ikan-ikan besar (Tapan, gabus, gurami) dan dalam jumlah banyak, sesuai besaran *tampirai* yang

dipunyai. Sementara kaum perempuan menangkap ikan-ikan kecil (Papuyu, Kakapar, Sasapar dan udang sungai). Jenis ikan yang ditangkap ini ada kaitannya dengan jenis alat yang digunakan oleh nelayan.

- e. Perbedaan pemahaman tentang penghasilan. Nelayan laki-laki lebih berorientasi pada jumlah ikan dan besarnya pendapatan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan menikmati hasilnya kemudian. Rata-rata penghasilan mereka 2 juta rupiah sampai 4 juta rupiah, dengan fluktuasi harga dan jumlah ikan. Karena pada musin tertentu jumlah ikan amat banyak, tetapi pada musim lainnya sangat sedikit, bahkan sama sekali tidak ada. Sementara nelayan perempuan berorientasi pada rutinitas dan kepastian hasil perhari, tidak masalah penghasilan kecil, tetapi pasti ada setiap hari. Penghasilan mereka perhari antara 100 ribu rupiah sampai dengan 150 ribu rupiah perhari.

Terakhir, untuk memahamai “kekuasaan” dalam bidang domestik atau reproduksi. Perempuan memiliki “penguasaan” lebih besar atas kegiatan mengurus anak, memasak, membersihkan rumah, antar jemput anak sekolah dan sebagainya atau sebanyak 85,0 persen; dalam data akan dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 1.9. Pengelolaan Rumah Tangga atau Dapur di Kelurahan Kereng Bangkirai

Kategori	Jumlah	Persen
Perempuan	192	85.0
Laki-laki	7	3.1
Keduanya	23	10.2
Tidak Tahu	4	1.8
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>100</b>

Melalui FGD diperoleh gambaran bahwa kaum laki-laki melibatkan dalam aktifitas dalam kegiatan rumah tangga untuk kegiatan seperti membuang sampah, mengasuh anak, menolong menyelesaikan PR anak, membersihkan halaman rumah dan membersihkan alat tangkap ikan. Partisipasi kaum laki-laki ini dianggap sebagai “kebaikan”, karena peran serta suami atau ayah dalam pengasuhan anak dianggap sudah biasa karena keadaan, bukan bagian dari kewajiban. Sementara, aktivitas membersihkan halaman rumah dan alat tangkap dianggap sebagai kewajiban atau ada kaitannya dengan konstruksi gender tentang ruang publik.

#### IV. PEMBAHASAN: KONTEKS SOSIO-POLITIK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT KELURAHAN KERENG BANGKIRAI

##### 4.1. Kekuasaan Perempuan dalam Rumah Tangga

Pertama, secara tradisional, kesadaran diri perempuan terdapat pada sektor reproduksi meliputi aktifitas memasak, membersihkan rumah, menyusui, mengasuh anak, antar-jemput anak sekolah, mencuci dan berbelanja keperluan rumah tangga sangat tinggi. Perempuan dianggap memiliki tugas sebagai pengurus rumah dan keluarga. Walaupun pada kenyataannya perempuan dianggap mampu melakukan aktifitas mencari nafkah dari sektor perdagangan, tetapi tugas utama perempuan adalah tugas rumah tangga, yakni memasak dan mengurus anak atau dengan angka persepsi sebanyak 85 persen.

Atau dengan kata lain, domestik dianggap sebagai ranah penguasaan utama

perempuan. Jika ada perempuan yang tidak pandai memasak, maka kemungkinan akan mendapat cemoohan masyarakat. Kegiatan ini hampir semua dilakukan oleh perempuan, baik oleh isteri dan maupun oleh anak perempuan jika isteri meninggal atau isteri sibuk membantu suami mencari nafkah.<sup>27</sup> Dan aktivitas ini dilakukan oleh para isteri atau ibu meskipun mereka bekerja, baik nelayan, swasta maupun honorer, sehingga terjadi beban ganda pada perempuan pekerja.

Kedua, kesadaran kaum perempuan terhadap perubahan tanggung jawab mencari nafkah didorong oleh kondisi alamiah (*nature*) keluarga. Pengambilalihan tanggung jawab bekerja atau mencari nafkah tidak dirasakan memiliki kaitan dengan dampak langsung dari pembangunan dan pengembangan kawasan terhadap aktifitas produksinya, tetapi lebih banyak dikaitkan dengan kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, sesungguhnya perempuan melakukan “perebutan kekuasaan” atas ruang-ruang produktif untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga. Karena, dalam patriarki tradisional, perempuan adalah kelompok yang tidak bisa bertanggung jawab atas ekonomi keluarga, karena itu tugas laki-laki.

Dalam kondisi di atas, laki-laki terpaksa harus menerima usaha produktif perempuan dan masyarakat mengubah konsep gender menjadi “nafkah adalah tanggung jawab bersama”. Sementara, dalam patriarki kontemporer, laki-laki mendominasi sebagai pemimpin atau penguasa keluarga dimana perempuan membutuhkan persetujuan laki-laki untuk melakukan sesuatu. Dalam kondisi di atas, perempuan dapat “memaksa” persetujuan

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Riska, 26 Mei 2017 di tempat kediamannya.

suami karena kondisi ekonomi keluarga; bahwa akhirnya para suami “menyerahkan” kekuasaan patriakh pada kebebasan kaum perempuan. Atau dengan kata lain perempuan memiliki kekuasaan atau kebebasan untuk memutuskan sendiri aktifitas produktifnya atas nama stabilitas ekonomi rumah tangga.

Ketiga, aktifitas pengelolaan keuangan dalam keluarga juga lebih banyak dianggap cocok dikelola oleh perempuan, dengan angka persepsi sebanyak 63,9 persen. Secara tradisional, alasan kecocokan perempuan menjadi pengelola ekonomi keluarga adalah karena perempuan lebih sering tinggal di dalam rumah dan mengetahui semua kebutuhan dalam rumah, serta dianggap lebih hemat dalam pengelolaan rumah tangga. Sementara, pengambilan keputusan dalam pengelolaan kebutuhan penting keluarga diputuskan bersama suami dan isteri. Sehingga, dalam hal ini, aktifitas pengelola keuangan dalam keluarga lebih pantas dilakukan oleh perempuan dari pada laki-laki. Dalam prakteknya, wilayah kelola perempuan dalam keuangan berkaitan dengan konsumsi sehari-hari, jika berkaitan dengan investasi atau tabungan berada dalam wilayah kelola laki-laki. Sehingga, posisi kekuasaan tetap berada dalam tangan kaum patriaki.

#### 4.2. Kekuasaan Perempuan dalam Ranah Publik

Pertama, status sosial perempuan sebagai ibu dianggap sebagai sesuatu yang kodrati. Hal ini berpengaruh pada akses perempuan terhadap dunia sosial. Akses terhadap keputusan menjual tanah dan

rumah masih berada dalam kontrol suami, walaupun masyarakat beranggapan bisa dilakukan dalam keputusan bersama suami dan isteri isteri. Namun data lapangan membuktikan berbeda, bahwa akses laki-laki atau suami lebih tinggi, yakni sebanyak 58,4 persen, dibandingkan dengan akses perempuan, yakni sebanyak 22,1 persen. Faktor yang mempengaruhi akses tersebut ialah status laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga, dalam hal ini status perempuan atau isteri ialah sebagai pendamping keputusan suami. Hal ini menunjukkan terdapat konflik laten antara laki-laki dan perempuan, yakni perebutan sebagai orang yang “didengarkan” oleh keluarga; selanjutnya dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Masyarakat Dayak Ngaju sebenarnya menganut paham parental dan relatif setara dalam memperlakukan perempuan. Sehingga hak untuk didengarkan sebenarnya relatif sama. Namun pada kenyataannya, tidak demikian yang ditemukan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ranah publik. Misalnya jika kita melihat struktur administrasi kelurahan, maka perempuan berada dalam struktur “tukang urus surat atau uang”, misalnya menjadi sekretaris lurah atau RT. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi politik perempuan memang belum terpikirkan bagi masyarakat kelurahan bahkan oleh perempuan sendiri, bahwa partisipasi politik perempuan menentukan posisi perempuan dalam program pembangunan.<sup>29</sup>

Kedua, pemanfaatan utama hasil kerja atau mencari nafkah antara laki-laki dan perempuan terdapat kesamaan, yakni untuk keperluan konsumsi rumah tangga,

---

<sup>28</sup>Sangat terasa dalam pelaksanaan wawancara, bahwa antara suami dan isteri “berdialog” dan “berdebat” tentang suatu perihal.

<sup>29</sup> Hasil Observasi dan analisis data pada struktur pemerintahan di tingkat kelurahan dan

diperkuat dengan wawancara dengan Ibu Yuslep di RT 04, 30 Mei 2017, mengatakan yang mengurus kelurahan itu kalau bisa laki-laki dulu, perempuan tugasnya mengurus anak. Jika laki-laki tidak bisa baru perempuan.

kesehatan, pendidikan anak dan keperluan pribadi. Namun pemanfaatan sisa uang setelah membelanjakan kebutuhan rumah tangga terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jika kaum laki-laki memanfaatkannya untuk menambah investasi, berupa kebun, tanah atau modal usaha, sementara perempuan memanfaatkannya untuk membeli emas dan barang kelengkapan rumah tangga.

Faktor status sosial suami sebagai kepala keluarga menjadi faktor pendorong untuk melakukan investasi, sebagai wujud pemberi warisan kepada keturunan selanjutnya berupa tanah. Selain itu itu, disebabkan faktor budaya, laki-laki sebagai pemberi *palaku* (mahar) berupa tanah, sehingga penting untuk mewariskan sebidang tanah juga bagi anak laki-laki.<sup>30</sup> Sementara, Sangat sedikit para nelayan ini yang memiliki akses pemanfaatan sisa penjualan untuk menabung di bank, karena faktor kebiasaan masyarakat yang cenderung menabung dalam perhiasan emas atau lainnya.

Walaupun dalam masyarakat Dayak Ngaju, umumnya berlaku palaku (mahar) sebidang tanah bagi perempuan. Namun dalam prakteknya, tanah itu bukan hak milik perempuan, tetapi dianggap sebagai harta bersama keluarga, yang hak warisnya berada di tangan anak laki-laki, sebagai pihak yang memberikan mahar. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan kekuasaan perempuan terhadap tanah sangat lemah. Sehingga di ranah hukum waris, perempuan kurang mendapatkan tempat sebagai pihak yang sebenarnya merupakan pemilik awal tanah tersebut. Sehingga sesungguhnya perempuan keluarahan tidak terdapat kemandirian ekonomi, tergantung pada struktur patriakhi dalam masyarakat.

Ketiga, akses perempuan dan laki-laki terhadap pemanfaatan waktu luang cenderung terdapat perbedaan yakni ikut organisasi dan dan membersihkan rumah. Perempuan lebih banyak menggunakan waktu luangnya untuk ruang domestik, sementara laki-laki di ruang publik. Hal ini dipengaruhi oleh paham masyarakat yang bias gender, yang menempatkan dikotomi publik dan domestik. Paham gender ini tidak hanya dianut oleh kaum laki-laki tetapi kaum perempuan juga, yang memang pemahaman gender yang demikian merupakan warisan turun temurun. Atau dengan kata lain, perempuan belum memikirkan organisasi sebagai aktifitas yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik.

Kalaupun ada keterlibatan perempuan dalam organisasi, biasanya dalam organisasi keagamaan, itu pun yang berkaitan dengan kegiatan yang hak perempuan, misalnya seksi pelayanan perempuan (SPPer) di Gereja ataupun *Yasinan* atau pengajian di langgar atau mesjid. Hal ini menunjukkan terdapat pemisahan aktifitas laki-laki dan perempuan di ranah publik. Bahwa kekuasaan utama dalam pengambilan keputusan di organisasi berada di tangan laki-laki, sementara kekuasaan perempuan dalam organisasi berkaitan dengan aktifitas yang paralel dengan aktifitas rumah tangganya.

Sehingga memang kondisi politik perempuan di pekeluarahan dapat dikatakan berada dalam level bawah, dengan tidak adanya keterlibatan dalam kepengurusan organisasi dan minimnya partisipasi perempuan dalam perencanaan program pembangunan.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan bapak Artel Yohanes, di RT 02, pada tanggal 15 Mei 2017

## V. SIMPULAN

Sebagaimana masyarakat Dayak pada umumnya, masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai secara ideologis tidak membedakan status laki-laki dan perempuan dalam ranah publik atau cenderung setara. Namun dalam pelaksanaan kekuasaan baik dalam lingkungan domestik dan publik terdapat perbedaan perlakuan, di mana kekuasaan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat dari perbandingan akses dan kontrol perempuan, baik dalam pengelolaan penghasilan dan investasi keluarganya. Kekuasaan laki-laki semakin menguat lagi dalam ranah publik dibandingkan perempuan terlihat dari partisipasi mereka dalam ranah publik.

Dalam lingkungan rumah tangga, urusan domestik masih dianggap sebagai ranah penguasaan utama perempuan, laki-laki hanya partisipan. Dan penguasaan terhadap skill dan “dunia kerja” berada dalam kontrol laki-laki, perempuan berpartisipasi di dalamnya karena terdorong kebutuhan ekonomi keluarga dan “terpaksa”, seperti suami sakit atau sudah meninggal. Sementara, pengelolaan keuangan dalam keluarga perempuan dianggap lebih cocok daripada laki-laki, namun dalam pelaksanaannya wilayah kelola perempuan dalam keuangan berkaitan dengan konsumsi sehari-hari, jika berkaitan dengan investasi atau tabungan berada dalam wilayah kelola laki-laki. Sehingga, posisi kekuasaan tetap berada dalam tangan kaum patriaki.

Dalam lingkungan publik, kondisi partisipasi politik perempuan dalam kelembagaan kelurahan dan organisasi sosial memang belum terpikirkan bagi masyarakat kelurahan bahkan oleh perempuan sendiri. Sementara, akses dan kekuasaan perempuan terhadap tanah

sangat lemah, sehingga sesungguhnya secara ekonomi perempuan kelurahan tidak mandiri. Di sisi lain, pemanfaatan waktu luang memberikan akses lebih luas bagi laki-laki untuk terlibat dalam ranah publik. Sehingga kekuasaan utama dalam pengambilan keputusan dalam kelembagaan kelurahan berada di tangan laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Kris “Perempuan dalam Rumah Ber(Tangga) dalam, Dr, Irwan Abdullah (ed), *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2003), 139-151.
- BPS Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Banama Tingang dalam Angka Tahun 2012, (Palangkaraya: BPS Kab. Pulang Pisau, 2013),
- Darwin, Muhadjir, *Prolog: Maskulinitas: Posisi Laki-laki dalam masyarakat Patriarkhi*, dalam *Menggugat Budaya Patriarkhi* (Yogyakarta : PPK UGM dan Ford Fondation, 2001).
- Edinayanti (ed), *Harga Karet di Pedalaman Barito Anjlok*, sumber: <http://kalteng.tribunnews.com/2011/11/21/harga-karet-di-pedalaman-barito-anjlok>, diposkan Senin, 21 November 2011.
- Fakih, Mansur, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996).
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2002).
- Humm, Maggie Ensiklopedi Feminisme, (Jakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).
- JURNAL STUDI GENDER & ANAK YINYANG, Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010 (Pusat Studi Gender STAIN

- Purwokerto) ISSN: 1907-2791, hlm 17-34
- Sadikin, Ikin Dan Irawan, Rudi, *Dampak Pembangunan Perkebunan Karet-Rakyat Terhadap Kehidupan Petani Di Riau*, [http://ejournal.unud.ac.id/Abstrak/\(5\) Soca-Ikin-Sadikin-Dampak-Pemb-Perkbn\(1\).Pdf](http://ejournal.unud.ac.id/Abstrak/(5)Soca-Ikin-Sadikin-Dampak-Pemb-Perkbn(1).Pdf)
- Scott, John, *Sosiologi (The Key Concept)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011).
- Serikat Petani Karet, *Pelatihan pembibitan SPKPH*, tanggal Minggu, 18 September 2011, sumber: <http://serikatpetanikaret.blogspot.com/1>
- Serikat Petani Karet, *Bau tidak sedap ini mata pencaharian kami*, dalam <http://serikatpetanikaret.blogspot.com/> diposkan tanggal Rabu, 30 November 2011.
- Simatauw, Meentje, dkk, *Gender dan Pengelolaan Sumber Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis*, Jogjakarta: Galang Printika, 2001.
- No Name, [potensidaerah.ugm.ac.id/.../p18\\_...](http://potensidaerah.ugm.ac.id/.../p18_...), t.th.